



**LAPORAN KETERANGAN  
PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)  
LAPORAN PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)  
TAHUN 2022**

**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK,  
KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN TANAH LAUT**

**Jalan. A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari 70814  
Email : [dinasp2kbp3atanahlaut@gmail.com](mailto:dinasp2kbp3atanahlaut@gmail.com)**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT karena dengan limpahan rahmat dan hidayah-Nya kami dapat menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang selanjutnya disingkat LKPJ dan Laporan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat LPPD Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) dengan baik.

Penyusunan LKPJ dan LPPD ini dimaksudkan sebagai bahan masukan untuk pembuatan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut kepada DPRD Kabupaten Tanah Laut serta informasi penyelenggaraan pemerintah daerah kepada masyarakat.

LKPJ dan LPPD ini memuat visi, misi prioritas dan sasaran pelaksanaan kegiatan, alokasi dan realisasi anggaran dari masing-masing kegiatan, hasil yang telah dicapai serta permasalahan yang dihadapi dan upaya pemecahannya.

Kami berharap, laporan ini dapat memberikan informasi yang diperlukan sekaligus juga sebagai bahan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan program yang menjadi tugas pokok dan fungsi SKPD dan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut umumnya pada tahun-tahun berikutnya.

Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan baik dalam pelaksanaan program maupun dalam penyusunan laporan ini, untuk itu kami mengharapkan adanya kritik dan saran yang sifatnya membangun untuk kebaikan dan kemajuan dalam pelaksanaan program kedepan, dan kepada semua pihak yang sudah membantu dalam penyusunan laporan ini diucapkan terima kasih.

Pelaihari, Januari 2023

Kepala Dinas P2KBP3A  
Kabupaten Tanah Laut,



**Ir. NORHIDAYAT**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19630824 199403 1 007

## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Dasar Hukum .....	1
1.2 Visi dan Misi .....	4
1.3 Data Umum Daerah .....	7
1. Data Geografis .....	7
2. Jumlah Penduduk .....	9
3. Jumlah PNS .....	9
4. Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja .....	11
 <b>BAB II PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH</b>	
Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah .....	17
 <b>BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH</b>	
3.1 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan .....	34
3.2 Capaian Kinerja Dinas P2KBP3A Kab. Tanah Laut .....	62
 <b>BAB IV PENUTUP</b>	
Penutup .....	68

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat LPPD adalah Laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang selanjutnya disingkat LKPJ adalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut laporan pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.

### **1.1. Dasar Hukum**

Tanah Laut mulanya adalah sebuah wilayah kewedanan yang berada di dalam wilayah Daswati II Banjar, memiliki wilayah yang cukup luas serta potensi yang cukup besar di beberapa bidang sebagai sumber pendapatan daerah, kehutanan beserta isinya, laut dan kekayaan alam didalamnya, barang-barang tambang yang terkandung dalam tanah, serta kesuburan lahan-lahan perkebunan dan pertanian. Potensi yang cukup besar dimiliki Tanah Laut pada masa itu belum bisa dimanfaatkan secara maksimal, kurangnya sarana dan prasarana memadai merupakan penyebab utamanya. Oleh karena itu keadaan yang demikian senada dengan beberapa kewedanan lain yang berada di Kalimantan Selatan, hingga muncul tuntutan semangat dan keinginan kuat para tokoh untuk menjadikan Tanah Laut sebagai Daswati II. Hasrat tersebut pernah disampaikan oleh beberapa wakil Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) melalui sebuah resolusi dalam konverda LVRI se-Kalimantan Selatan yang dilaksanakan di ibu kota kabupaten Banjar yaitu Martapura, disampaikan oleh Ach. Syahrani dan kawan-kawan pada tahun 1956.

Kemudian pada tahun 1957, H. Arpan dan kawan-kawan, selaku wakil rakyat Tanah Laut yang duduk di DPRD Banjar, memperjuangkan agar status wilayah kewedanaan yang disandang Tanah Laut dapat ditingkatkan menjadi Daswati II. Tekad tersebut membuahkan hasil dengan terselenggaranya rapat pada tanggal 3 Juni 1961, bertempat di rumah Moh. Afham, dipimpin oleh Materan HB. Rapat tersebut menghasilkan terbentuknya sebuah panitia persiapan pembentukan Daswati II Tanah Laut dengan ketua umum dipegang oleh Soearjan. Panitia ini dikenal dengan nama Panitia Tujuh Belas dengan tugas pokok melakukan persiapan penyelenggaraan musyawarah besar seluruh masyarakat Tanah Laut. Dalam pelaksanaannya panitia tersebut memiliki lima tugas pokok sebagai berikut:

1. Mengadakan hubungan dengan pemuka/tetua masyarakat guna mendapatkan dukungan.
2. Mengumpulkan data potensi daerah.
3. Mengusahakan pengumpulan dana.
4. Membuat pengumuman untuk disebarluaskan kepada masyarakat.
5. Menyelenggarakan ceramah dengan meminta kesediaan Ach. Syahrani, H. M. N. Manuar, Wedana Usman Dundrung, Mahyu Arief dan H. Abdul Wahab.

Usaha Panitia Tujuh Belas membawa hasil dengan terselenggaranya Musyawarah Besar se-Tanah Laut pada tanggal 1 dan 2 Juli 1961, dan menghasilkan resolusi pernyataan serta terbentuknya "Panitia Penyalur Hasrat Rakyat Tuntutan Deswati II Tanah Laut" yang diketahui oleh H.M.N. Manuar.

Pada tanggal 12 Juli 1962 panitia ini menyampaikan memori Tanah Laut ke-pada Bupati banjar dan wakil DPRD GR II Banjar. Menanggapi hal tersebut ketua seksi A DPRD melakukan peninjauan ke Tanah Laut pada tanggal 6 Agustus 1962, hasil peninjauan di bawa kedalam sebuah sidang pada tanggal 3 September 1962, memutuskan memberikan dukungan kepada tuntutan Tanah Laut untuk dijadikan Daswati II, dengan Surat Keputusan nomor 37/3/DPRDGR/1962. Dengan diterbitkannya Surat

Keputusan tersebut, Panitia terus berusaha mendapatkan dukungan DPRD GR I Kalimantan Selatan, aspirasi ini disampaikan pula melalui Kerukunan Keluarga Tanah Laut. Atas usaha tersebut pada tanggal 26 November 1962 tim DPRD GR I melakukan peninjauan, dari hasil kunjungan tersebut DPRD GR I mendukung usaha Tanah Laut dengan terbentuknya sebuah Resolusi yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah dengan Surat bernomor 12/DPRDGR/RES/1962.

Sebagai realisasi dari resolusi, DPRD GR tingkat I Kalimantan Selatan mengirimkan tim yang dipimpin ketua komisi B, yaitu Imam Sukami Handokowijoyo dan tiba di Tanah Laut pada tanggal 27 Oktober 1963 yang disambut dengan rapat umum, dilanjutkan dengan peninjauan ke daerah Kintap serta Ujung Batu, kemudian melakukan pertemuan dengan pejabat dan panitia penuntut. Dalam pertemuan dengan DPR GR RI tim mengajukan agar panitia ditingkatkan menjadi Badan Persiapan Pembentukan Deswata II Tanah Laut, dengan ketua H.M.N. Manuar. Pada tanggal 31 Oktober 1963 sidang DPRD GR tingkat I Kalimantan Selatan menyetujui resolusi yang mendesak kepada Gubernur untuk menunjuk Penguasa Daerah bagi Tapin, Tabalong dan Tanah Laut. Kemudian pada tanggal 11 Agustus 1964 diadakan serah terima kekuasaan Kewedanaan Tanah Laut kepada Bupati Banjar yang selanjutnya pada tanggal 9 September 1964 diresmikan kantor Persiapan Tk. II Tanah Laut oleh bapak Gubernur Kalimantan Selatan, sekaligus melantik GT. M. Taberi sebagai kepala kantor persiapan.

Pada tanggal 24 April 1965 Badan persiapan yang diperbaharui dalam suatu musyawarah di Gedung Bioskop Sederhan Pelaihari yang dipimpin oleh A. Wahid dan berhasil menyusun Badan Persiapan Tk. II yang baru dengan ketua umum R. Sugiarto dan sekretaris umum adalah A. Miskat. Dalam kurun waktu Agustus sampai dengan November 1965, Badan Persiapan mengadakan beberapa kali rapat dan pertemuan dalam rangka mempersiapkan menyambut lahirnya Kabupaten Tanah Laut yang sudah diambang pintu. Dengan lahirnya Undang-Undang nomor 8 tahun 1965,

tentang pembentukan Deswati II Tapin, Tabalong dan Tanah Laut, maka pada tanggal 2 Desember 1965 dilaksanakan upacara peresmian berdirinya Deswati II Tanah Laut oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah DR. Soemarno. Dengan demikian tanggal 2 Desember dicatat sebagai Hari Jadi Kabupaten Tanah Laut yang diperingati setiap tahunnya.

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Untuk mengetahui keberhasilan pelaksanaan tugas Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak maka perlu Mengevaluasi tugas pokok tersebut dalam bentuk laporan pertanggungjawaban Dinas Kesehatan (LKPJ) dimana dalam penyusunannya berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang LPPD, LKPJ dan ILPPD

## **1.2. Visi dan Misi**

Visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih dalam RPJMD 2019-2023 adalah “ Terwujudnya Tanah Laut Yang Berinteraksi (Berkarya, Inovasi, Tertata, Religius, Aktual dan Sinergi) Unsur visi yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas P2KBP3A adalah Berinteraksi (Berkarya, Inovasi, Tertata, Religius, Aktual dan Sinergi) yang berarti adalah :

Berkarya : 1. Berkarya Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis

teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya

- Inovasi : 1. Menciptakan inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif
- Tertata : 3. Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)
- Religius : 1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas Religiusitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kehidupan masyarakat
- Aktual : 2. Membangun sinergitas yang baik antar tingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat
- Sinergi : 2. Membangun sinergitas yang baik antar tingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Dalam rangka pencapaian visi diatas, misi pembangunan jangka menengah dalam RPJMD adalah sebagai berikut:

1. Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya.
2. Menciptakan inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif.
3. Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).
4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas religiusitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan kehidupan.
5. Membangun sinergitas yang baik antar tingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat .

Dalam mendukung mewujudkan visi dan misi Kabuapten Tanah Laut terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kabupaten Tanah Laut dalam mendukung 4 (Empat) yaitu :

1. **Pada misi 1 (Satu)** yaitu Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya. Tujuan yang terkait dengan Tupoksi Dinas P2KBP3A Kabupaten Tanah Laut dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat adalah **sasaran** Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan bidang kesehatan dengan **indikator** sasaran Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP), Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR) per WUS 15-19 tahun, Meningkatnya pemakaian kontrasepsi modern (mCPR), Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmed-Need). **Intervensi** Dinas P2KBP3A Kabupaten Tanah Laut adalah pada capaian Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk.
2. **Pada misi 3 (Tiga)** yaitu Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) **Tujuan** yang terkait dengan Tupoksi Dinas P2KBP3A Kabupaten Tanah Laut Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan public yang berkualitas berbasis teknologi informasi dengan **sasaran** Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan dan reformasi pelayanan public, indicator Nilai sistem akuntabilitas kinerja SKPD dan Indeks kepuasan Masyarakat (IKM) di dukung program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program pemenuhan, peningkatan sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas SDM, Program perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja. **Intervensi** Dinas P2KBP3A Kabupaten Tanah Laut adalah pada capaian Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan dan reformasi pelayanan public.
3. **Pada misi 5 (Lima)** Yaitu Membangun sinergitas yang baik antar tingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tujuan yang terkait dengan Tupoksi Dinas P2KBP3A Kabupaten Tanah Laut adalah Peningkatan kinerja pembangunan yang berkualitas bidang ekonomi dan sosial budaya (Pembangunan Inklusif)

sasaran Meningkatkan kualitas pertumbuhan Ekonomi dengan indikator sasaran Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) **Intervensi** Dinas P2KBP3A Kabupaten Tanah Laut adalah pada capaian Meningkatnya kualitas hidup perempuan yang berkeadilan gender.

Sebagaimana telah diurai diatas bahwa Visi, Misi, Program RPJMD 2018-2023 merupakan target capaian yang menjadi keinginan dan cita-cita serta impian yang akan diwujudkan oleh Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut dalam 5 (Lima) Tahun kedepan. Dengan berpedoman pada RPJMD maka Dinas P2KBP3A Kabupaten Tanah Laut sesuai dengan Tugas dan fungsinya bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program-program yang berkontribusi dalam menunjang keberhasilan mewujudkan target capaian program prioritas utama. Dalam perjalanan pelaksanaan program tentunya terdapat faktor penghambat dan pendorong dalam urusan pelayanan pada Dinas P2KBP3A Kabupaten Tanah Laut.

### **1.3. Data Umum Daerah**

#### **1. Data Geografis**

Kabupaten Tanah Laut merupakan kabupaten yang terletak paling selatan dari Provinsi Kalimantan Selatan dengan ibukota Pelaihari. Secara geografis, letak wilayah Kabupaten Tanah Laut berada di bagian selatan Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, dengan posisi 114°30'20" sampai 115°23'31" Bujur Timur dan 3°30'33" sampai 4°11'38" Lintang Selatan. Sedangkan secara administrasi, wilayah Kabupaten Tanah Laut memiliki luas wilayah daratan mencapai 3.631,35 km<sup>2</sup> atau 9,17% dari luas wilayah Kalsel. Kabupaten Tanah Laut terdiri dari 11 (sebelas) wilayah Kecamatan yang terbagi dalam 130 Desa dan 5 Kelurahan.

Luas tersebut belum termasuk luas zona perairan laut, sepanjang 3 mil dari garis pantai pada saat pasang tertinggi sepanjang 200 km. Bila

luas daratan Kabupaten Tanah Laut ditambah dengan luas zona perairan lautnya, maka luas total luas wilayah menjadi 449.730 Ha atau 4.497,3 km<sup>2</sup>. Adapun batas administrasi dapat diuraikan sebagai berikut Utara Kota Banjarbaru, Selatan Laut Jawa, Timur Kabupaten Tanah Bumbu dan sebelah barat Laut Jawa.

Ruang lingkup wilayah administrasi wilayah Kabupaten Tanah Laut meliputi 11 Kecamatan, yaitu Kecamatan Bati-Bati, Kecamatan Bumi Makmur, Kecamatan Kurau. Kecamatan Tambang Ulang, Kecamatan Bajuin, Kecamatan Pelaihari, Kecamatan Takisung, Kecamatan Panyipatan, Kecamatan Batu Ampar, Kecamatan Jorong, dan Kecamatan Kintap. Kabupaten Tanah Laut terdiri dari 11 Kecamatan. Daerah yang paling luas adalah Kecamatan Jorong dengan luas 628,00 km<sup>2</sup>, kemudian Kecamatan Batu Ampar seluas 548,10 km<sup>2</sup> dan Kecamatan Kintap dengan luas 537,00 km<sup>2</sup>, sedangkan kecamatan yang luas daerahnya paling kecil adalah Kecamatan Kurau dengan luas hanya 127,00 km<sup>2</sup>.

**Tabel 1.1 Daftar Nama Kecamatan di Kabupaten Tanah Laut beserta luas wilayahnya**

<b>NO.</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>LUAS AREA</b>	<b>PERSENTASE LUAS KECAMATAN DENGAN LUAS KABUPATEN</b>
1.	PANYIPATAN	336,00	9,25
2.	TAKISUNG	343,00	9,45
3.	KURAU	127,00	3,50
4.	BUMI MAKMUR	141,00	3,88
5.	BATI-BATI	234,75	6,46
6.	TAMBANG ULANG	160,75	4,43
7.	PELAIHARI	379,45	10,45
8.	BAJUIN	196,30	5,41
9.	BATU AMPAR	548,10	15,09
10.	JORONG	628,00	17,29
11.	KINTAP	537,00	14,79

## 2. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Tanah Laut dengan sumber data yaitu Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester I Tahun 2022 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut

**Tabel 1.2 Jumlah Penduduk Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023**

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1.	PANYIPATAN	12,745	12,590	25,335
2.	TAKISUNG	16,663	16,228	32,891
3.	KURAU	7,147	7,031	14,178
4.	BUMI MAKMUR	7,118	6,939	14,057
5.	BATI-BATI	2,698	22,014	44,712
6.	TAMBANG ULANG	9,400	9,107	18,507
7.	PELAIHARI	39,750	39,043	78,793
8.	BAJUIN	9,928	9,437	19,365
9.	BATU AMPAR	14,273	13,560	27,833
10.	JORONG	17,762	16,684	34,446
11.	KINTAP	22,126	20,947	43,073
	JUMLAH	179,610	173,584	353,190

## 3. Jumlah PNS

Dalam rangka penyelesaian tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Laut pada Tahun 2022 didukung sumberdaya manusia yang diklasifikasikan kedalam komposisi pegawai menurut Jenis kepegawaian, Komposisi Pegawai (PNS Daerah) Menurut golongan, Komposisi Pegawai (PNS Daerah) Menurut Jenis Pendidikan, Komposisi Pegawai (PNS Daerah) Berdasarkan Jabatan Struktural dan Fungsional, Komposisi Pegawai (PNS Daerah) Berdasarkan Pangkat dan Golongan, komposisi pegawai

per Desember 2022 disajikan terpilah laki-laki dan perempuan sebagai berikut :

**Tabel 1.3 Komposisi Pegawai Menurut Jenis Kepegawaian**

No	Jenis Kepegawaian	Jumlah		Total
		Laki-laki	Perempuan	
1	PNS Daerah	8	17	25
2	PTT Daerah	12	6	18
	Jumlah	20	26	43

**Tabel 1.4 Komposisi Pegawai Menurut Golongan**

No	Golongan	Jumlah		Total
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Golongan I	0	0	0
2	Golongan II	2	2	4
3	Golongan III	0	10	10
4	Golongan IV	6	5	11
	Jumlah	8	7	25

**Tabel 1.5 Komposisi Pegawai Menurut Jabatan Struktural**

No	Jabatan Struktural	Esselon	Jumlah		Total
			Laki-Laki	Perempuan	
1	Kepala Dinas	Esselon II	1	0	1
2	Sekretaris	Esselon II	1	0	1
3	Kepala Bidang		1	2	3
4	Kasubbag/Kepala Seksi	Esselon IV	0	2	2
5	Kepala UPT		0	1	1
	Jumlah		3	5	8

#### 4. Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja

Pencapaian target kinerja keuangan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut TA. 2022 dengan realisasi sebesar Rp. 11.663.779.056,- atau 78,85% dari jumlah anggaran Rp. 14.792.856.788,- dengan rincian sebagai berikut :

1. Belanja Operasi sebesar Rp. 10.402.683.372,- atau 77,64 % dari anggaran sebesar Rp. 13.398.329.803,- dan
2. Belanja Modal sebesar Rp. 1.261.095.684,- atau 90,43% dari anggaran sebesar Rp. 1.394.526.985,- .

Adapun rincian Belanja Operasi terdiri dari 8 Program, 20 Kegiatan dan 46 Sub Kegiatan dapat disajikan dalam bentuk program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Realisasi kinerja keuangan tahun 2022 adalah sebesar Rp. 5.486.954.255,- atau 87,74% dari anggaran sebesar Rp. 6.253.882.480,- realisasi kinerja keuangan tersebut merupakan realisasi belanja pegawai dan belanja barang dan jasa diwujudkan dalam kegiatan sub kegiatan sebagai berikut :

**Tabel 1.6 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**

1	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Rp. 4.456.804.024,-</b>
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 4.456.804.024,-
2	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Rp. 295.479.570,-</b>
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp. 7.467.000,-
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 74.200.000,-
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp. 12.034.140,-
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp. 2.640.000,-
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	Rp. 12.179.741,-
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	Rp. 186.958.689,-

	Konsultasi SKPD	
3	<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>0</b>
	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0
4	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Rp. 499.011.197,-</b>
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 57.142.391,-
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 441.868.806,-
5	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Rp. 119.675.780,-</b>
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp. 24.188.703,-
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp. 82.497.077,-
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp. 12.990.000,-
6	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Rp. 115.983.684,-</b>
	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Rp. 13.479.000,-
	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp. 102.504.684,-
<b>JUMLAH</b>		<b>Rp. 5.486.954.255,-</b>

2. Program Pengendalian Penduduk Realisasi kinerja keuangan tahun 2022 adalah sebesar Rp. 176.116.434,- atau 81,56% dari anggaran sebesar Rp. 215.934.411,- realisasi kinerja keuangan tersebut merupakan realisasi belanja pegawai, belanja barang diwujudkan dalam kegiatan sebagai berikut :

**Tabel 1.7 Program Pengendalian Penduduk**

1	<b>Kegiatan Pemanduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk</b>	<b>Rp. 13.158.730,-</b>
	Sub Kegiatan Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Rp. 13.158.730,-
2	<b>Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Rp. 162.957.704,-</b>
	Sub Kegiatan Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain	Rp. 13.300.203,-
	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Rp. 19.786.391,-
	Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Rp. 7.963.407,-

	Sub Kegiatan Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Rp. 121.907.703,-
<b>JUMLAH</b>		<b>Rp. 176.116.434,-</b>

3. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) Realisasi kinerja keuangan tahun 2022 adalah sebesar Rp. 4.134.166.576,- atau 87,52% dari anggaran sebesar Rp. 4.723.341.676,- realisasi kinerja keuangan tersebut merupakan realisasi belanja pegawai dan belanja barang diwujudkan dalam kegiatan sebagai berikut :

**Tabel 1.8 Program Pembinaan Keluarga Berencana**

1	<b>Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal</b>	<b>Rp. 690.817.212,-</b>
	Sub Kegiatan Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Rp. 4.266.800,-
	Sub Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	Rp. 24.100.424,-
	Sub Kegiatan Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Rp. 97.937.265,-
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan mini Lokakkarya (Minilok)	Rp. 129.345.000,-
	Sub Kegiatan Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Rp. 20.800.000,-
	Sub Kegiatan Pengendalian Program KKBPK	
2	<b>Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)</b>	<b>Rp. 2.067.064.141,-</b>
	Sub Kegiatan Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Rp. 2.067.064.141,-
3	<b>Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Rp. 1.088.400.223,-</b>
	Sub Kegiatan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Rp. 9.880.000,-
	Sub Kegiatan Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Rp. 215.142.127,-
	Sub Kegiatan Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Rp. 58.865.000,-
	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Rp. 770.762.000,-

	Sub Kegiatan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Rp. 33.751.096,-
4	<b>Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB</b>	<b>Rp. 287.885.000,-</b>
	Sub Kegiatan Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Rp. 287.885.000,-
<b>JUMLAH</b>		<b>Rp. 4.134.166.576,-</b>

4. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) Realisasi kinerja keuangan tahun 2022 adalah sebesar Rp. 1.294.974.801,- atau 52,19% dari anggaran sebesar Rp. 2.481.507.100,- realisasi kinerja keuangan tersebut merupakan realisasi belanja pegawai dan belanja barang diwujudkan dalam kegiatan sebagai berikut:

**Tabel 1.9. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)**

	<b>Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>	<b>Rp. 1.294.974.801,-</b>
1	Sub Kegiatan Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Rp. 107.544.301,-
	Sub Kegiatan Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Rp. 144.477.048,-
	Sub Kegiatan Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Rp. 81.210.950,-
	Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB,BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Rp. 588.347.502,-
	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB,BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Rp. 373.395.000,-
<b>JUMLAH</b>		<b>Rp. 1.294.974.801,-</b>

5. Program Perlindungan Khusus Anak Realisasi kinerja keuangan tahun 2022 adalah sebesar Rp. 232.637.619 ,- atau 46,73% dari

anggaran sebesar Rp. 497.807.295,- realisasi kinerja keuangan tersebut merupakan realisasi belanja pegawai dan belanja barang diwujudkan dalam kegiatan sebagai berikut :

**Tabel 1.10. Program Perlindungan Khusus Anak**

1	<b>Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Rp. 45.574.000,-</b>
	Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kab/kota	Rp. 45.574.000,-
2	<b>Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Rp. 160.989.088,-</b>
	Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 113.813.500,-
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan perlindungan khusus kewenangan Kab/Kota	Rp. 47.175.588,-
3	<b>Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Rp. 38.350.556</b>
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 38.350.556
<b>JUMLAH</b>		<b>Rp. 232.637.619,-</b>

6. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) Realisasi kinerja keuangan tahun 2022 adalah sebesar Rp. 107.580.816,- atau 62,85% dari anggaran sebesar Rp. 171.170.679,- realisasi kinerja keuangan tersebut merupakan realisasi belanja pegawai dan belanja barang diwujudkan dalam kegiatan sebagai berikut :

**Tabel 1.11. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)**

1	<b>Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>Rp. 107.580.816,-</b>
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 107.580.816,-
<b>JUMLAH</b>		<b>Rp. 107.580.816,-</b>

7. Program Perlindungan Perempuan Realisasi kinerja keuangan tahun 2022 adalah sebesar Rp. 96.503.525,- atau 33,08% dari anggaran sebesar Rp. 291.711.210,- realisasi kinerja keuangan tersebut merupakan realisasi belanja pegawai dan belanja barang diwujudkan dalam kegiatan sebagai berikut :

**Tabel 1.12. Program Perlindungan Perempuan**

1	<b>Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Rp. 21.450.000,-</b>
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kab/Kota	Rp. 21.450.000,-
2	<b>Kegiatan Penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan kab/kota</b>	<b>Rp. 23.261.525,-</b>
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kab/Kota	Rp. 23.261.525,-
3	<b>Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Rp. 51.792.000,-</b>
	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp. 260.000,-
	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp. 51.532.000,-
<b>JUMLAH</b>		<b>Rp. 96.503.525,-</b>

8. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Realisasi kinerja keuangan tahun 2022 adalah sebesar Rp. 134.845.030,- atau 86% dari anggaran sebesar Rp. 157.501.937 realisasi kinerja keuangan tersebut merupakan realisasi belanja pegawai dan belanja barang diwujudkan dalam kegiatan sebagai berikut :

**Tabel 1.13. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan**

1	<b>Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>Rp. 134.845.030,-</b>
	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp. 134.845.030,-
<b>JUMLAH</b>		<b>Rp. 134.845.030,-</b>

**BAB II**  
**PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

Penyusunan Perubahan SKPD ini mengacu pada Rancangan Awal RKPD, renstra SKPD, serta hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi serta mendasarkan kegiatan pada usulan masyarakat.

**Tabel 2.1. EVALUASI HASIL RENJA SKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022**

Nama SKPD : Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja Renstra Sampai Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program , Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja	Realisasi Kinerja Renja	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Target (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	8=(7/6)	9(5+7)	10=(9/4)
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2	14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN								



2	14	01	2	06	06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah surat kabar harian yang terbeli			730 eksemplar	302 eksemplar	41%		
						Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	Jumlah keikutsertaan pameran			2 event	0	0%		
2	14	01	2	06	09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah makanan dan minuman jamuan tamu Jumlah perjalanan dinas yang diikuti Jumlah rapat yang dilaksanakan			30 orang 12 bulan 12 kali	15 orang 5 bulan / 46 kali 6 kali	50% 42% 50%		
2	14	01	2	07		<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>				
2	14	01	2	07	05	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah jenis kursi kerja yang terbeli Jumlah jenis lemari arsip yang terbeli Jumlah jenis meja kerja yang terbeli			1 jenis 1 jenis 1 jenis	0 0 0	0% 0% 0%		
2	14	01	2	07	11	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah AC yang terbeli Jumlah PC Desktop yang terbeli Jumlah printer yang terbeli			2 unit 3 unit 3 buah	2 unit 3 unit 3 unit	100.00% 100.00% 100.00%		
2	14	01	2	08		<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Kegiatan Penyediaan Jasa</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>				



2	14	01	2	09	10	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara			20 Unit	7 unit	35%		
2	14	02				<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK</b>	<b>Angka Menurunnya Total Fertility Rate (TFR) per Wanita Usia Subur</b>	2,22	2,81	2,24				
2	14	02	2	01		<b>Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk</b>	<b>Persentase sektor yang tersosialisasi konsep pembangunan yang berwawasan berkependudukan dan alat ukurnya (IPBK/Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan)</b>	18,51 %						
2	14	02	2	01	05	Sub Kegiatan Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Jumlah Sekolah yang dibentuk Sekolah Siaga Kependudukan (SSK)			2 Sekolah	1 Sekolah	50%		
2	14	02	2	02		<b>Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase sektor yang tersosialisasi konsep pembangunan yang berwawasan berkependudukan dan alat ukurnya (IPBK/Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan)</b>	18,51 %		18,51				
2	14	02	2	02	08	Sub Kegiatan Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain	Jumlah Rumah Data Kependudukan Yang Di update			2 buah	0	0%		

2	14	02	2	02	09	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Sistem Informasi Keluarga			11 Balai Penyuluh KB	0	0%		
2	14	02	2	02	13	Sub Kegiatan Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pendataan Keluarga			350 lembar data	145 lembar data	41%		
2	14	03				<b>PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</b>	<b>Angka Menurunnya Total Fertility Rate (TFR) per Wanita Usia Subur</b>	<b>2,22</b>	<b>2,81</b>	<b>2,24</b>				
2	14	03	2	01		<b>Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal</b>	<b>Persentase Pemenuhan Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal</b>	<b>100%</b>		<b>100%</b>				
2	14	03	2	01	04	Sub Kegiatan Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Media Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang Jumlah sarana KIE (Pamflet) yang didistribusikan Jumlah sarana KIE (Poster) yang didistribusikan			4 Media  297 buah  101 buah	1 media  masih dalam proses masih dalam proses	25%		

2	14	03	2	02		<b>Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)</b>	<b>Persentase Pemenuhan Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal</b>	<b>100.00%</b>			<b>100%</b>					
2	14	03	2	02	04	Sub Kegiatan Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader PPKBD yang Dibayar Honorarium Selama 9 bulan Jumlah Kader Sub PPKBD yang Dibayar Honorarium Selama 7 bulan Jumlah Pelaksanaan Lomba Kader IMP			135 kader/9 bulan 421 kader/7 bulan 1 lomba	155 476 0	13% 16% 0%				
2	14	03	2	03		<b>Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Pengendalian Alat, Obat Kontrasepsi (ALOKON) dan Pelayanan KB</b>	<b>100.00%</b>								
2	14	03	2	03	03	Sub Kegiatan Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Akseptor KB Implant/IUD yang dilayani Jumlah Akseptor KB MOP yang dilayani Jumlah Akseptor KB MOW yang dilayani			1000 Akseptor 10 Akseptor 100 Akseptor	82 Implant, 2 IUD 0 0	8% 0% 0%				
							Jumlah Akseptor Yang Mendapat Rapid Test Antigen			90 Akseptor	0	0%				

							Jumlah Pelaksanaan Evaluasi Pelayanan KB			1 Pertemuan	0	0%		
							Jumlah Pelaksanaan Pelayanan KB Bergerak / Pembinaan / Monitoring / Evaluasi Program Keluarga Berencana di 11 Kecamatan			44 kali	8 kali	18%		
							Jumlah Pelaksanaan Pelayanan Komplikasi			1 Tahun/bulan	1			
2	14	03	2	03	08	Sub Kegiatan Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan, Evaluasi dan Monitoring Tim Keluarga Berencana Keliling (TKBK)	21 faskes		21 faskes	0	0%		
2	14	03	2	03	09	Sub Kegiatan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Jumlah Pelaksanaan Orientasi Kesehatan Reproduksi			2 Pertemuan	0	0%		
2	14	04				<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</b>	<b>Angka Menurunnya Kelahiran Total (TFR) Per Wus</b>	<b>2,22%</b>	<b>2,81</b>	<b>2,24</b>				
2	14	04	2	01		<b>Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>	<b>Persentase Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>	<b>100%</b>		<b>100%</b>				
2	14	04	2	01	03	Sub Kegiatan Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Pelaksanaan Jambore Ajang Kreatifitas Genre			1 kegiatan	0	0%		
							Jumlah Pelaksanaan Lomba Pada Jambore Ajang Kreatifitas Genre			3 lomba	0	0%		

							Jumlah Pelaksanaan Pembekalan tentang Program PIK-R/Genre pada Jambore Ajang Kreatifitas Genre			2 kegiatan	0	0%		
							Jumlah Pelaksanaan Pembinaan, Evaluasi dan Monitoring Program PIK-Remaja di 11 Kecamatan			2 kali	1 kali	50%		
2	14	04	2	01	04	Sub Kegiatan Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Pelaksanaan Hari Keluarga Nasional Tingkat Kabupaten Tanah Laut Jumlah Pelaksanaan Orientasi Tri Bina Ketahanan Keluarga (BKB/BKL/BKR) Jumlah Pelaksanaan Pembinaan dan Lomba Jumlah Pelaksanaan Pembinaan, Evaluasi dan Monitoring Program Ketahanan Keluarga			1 kali 3 pertemuan 2 lomba 4 kali	0 1 pertemuan 0 0	0% 33% 0% 0%		
2	14	04	2	01	07	Sub Kegiatan Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Gelar Dagang Produk UPPKA yang Diikuti Jumlah Pelaksanaan Orientasi UPPKA Jumlah Pelaksanaan Pembinaan & Lomba UPPKA			2 event 2 pertemuan 1 lomba	0 2 pertemuan 0	0% 100% 0%		
						Jumlah Pembinaan / Monitoring / Evaluasi Program Serta Kegiatan Pemberdayaan Keluarga				4 kali	1 kali	25%		

							di 11 Kecamatan							
2	08						<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>							
2	08	02					<b>PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>	<b>Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)</b>	<b>68.48%</b>		<b>68.44%</b>			
2	08	02	2	03		<b>Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Pemenuhan Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>100%</b>		<b>100%</b>				
2	08	02	2	03	02	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok home industri yang dibina Jumlah koordinasi organisasi perempuan Jumlah organisasi perempuan yang dibina			38 kelompok 15 organisasi 29 organisasi	11 kelompok 7 organisasi 12 organisasi	29% 47% 41%		
2	08	03				<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>	<b>Persentase kasus perempuan yang ditangani</b>	<b>100%</b>		<b>100%</b>				
2	08	03	2	03		<b>Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dalam situasi darurat dan kondisi khusus	<b>100%</b>		<b>100%</b>				



2	08	07	2	02	01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kasus anak yang ditangani			30 kasus	11 kasus	37%		
---	----	----	---	----	----	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------	--	--	----------	----------	-----	--	--

Beberapa Kegiatan mengalami perubahan adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.2. Anggaran Perubahan Tahun 2022**

<b>Program/Kegiatan/Sub Kegiatan</b>	<b>Jumlah Sebelum</b>	<b>Jumlah Sesudah</b>	<b>Alasan Berubah</b>
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK</b>	<b>595.515.878</b>	<b>1.118.191.121</b>	
<b>PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>	<b>82.680.026</b>	<b>157.501.937</b>	
<b>Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Wewenang Kabupaten/kota</b>	82.680.026	157.501.937	
Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Layanan Pemberdayaan Perempuan Wewenang Kabupaten/kota	82.680.026	157.501.937	Kegiatan bagi DWP, GOW dan GATRIWARA
<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>	<b>112.308.449</b>	<b>291.711.210</b>	
<b>Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>0</b>	<b>45.391.972</b>	
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kab/Kota	0	45.391.972	Penambahan anggaran bersumber dari Dana DAK Non Fisik Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak
<b>Kegiatan Penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan kab/kota</b>	<b>0</b>	<b>95.768.111</b>	
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan	0	95.768.111	Penambahan anggaran bersumber dari Dana

Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kab/Kota			DAK Non Fisik Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak
<b>Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>112.308.449</b>	<b>150.551.127</b>	
Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	0	38.276.358	Penambahan anggaran bersumber dari Dana DAK Non Fisik Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak
Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	112.308.449	112.274.769	
<b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK</b>	<b>171.170.679</b>	<b>171.170.679</b>	
<b>Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>171.170.679</b>	<b>171.170.679</b>	
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	171.170.679	171.170.679	
<b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>	<b>229.356.724</b>	<b>497.807.295</b>	
<b>Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>0</b>	<b>64.982.422</b>	
Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kab/kota	0	64.982.422	Penambahan anggaran bersumber dari Dana DAK Non Fisik Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak
<b>Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>229.356.724</b>	<b>394.474.317</b>	
Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	229.356.724	229.356.724	
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan perlindungan khusus kewenangan Kab/Kota	0	165.117.593	Penambahan anggaran bersumber dari Dana DAK Non Fisik Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak

<b>Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>0</b>	<b>Rp. 38.350.556</b>	
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<b>0</b>	Rp. 38.350.556	Penambahan anggaran bersumber dari Dana DAK Non Fisik Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>	<b>8.676.056.436</b>	<b>13.674.665.667</b>	
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	6.145.926.555	6.253.882.480	Penambahan anggaran bersumber dari Dana DAK Non Fisik Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak
<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>5.128.832.656</b>	<b>5.128.832.656</b>	
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.128.832.656	5.128.832.656	
<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>278.226.224</b>	<b>324.276.874</b>	
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.699.230	9.173.848	Pembelian peralatan listrik untuk penyambungan listrik pada Gudang Alokon ke Bangunan Utama Kantor, pengadaan kabel dan lain-lain (4 jenis)
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	84.468.932	84.468.932	
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	21.535.311	21.535.311	
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.480.000	3.480.000	
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	15.042.751	12.994.708	
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150.000.000	192.624.075	Penambahan jumlah kegiatan rapat dalam rangka pencegahan stunting, penambahan pelatihan dan penambahan perjalanan dinas
<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>509.838.330</b>	<b>512.336.973</b>	
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	58.793.875	61.292.518	Untuk kekurangan pembayaran tagihan listrik
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	451.044.455	451.044.455	
<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang</b>	<b>157.650.000</b>	<b>162.412.800</b>	

<b>Urusan Pemerintahan Daerah</b>			
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	30.000.000	30.000.000	
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	115.000.000	115.000.000	
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12.650.000	17.412.800	Pembuatan pintu pada ruang penyimpanan obat di Gudang Alokon DP2KBP3A
<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>71.379.345</b>	<b>126.023.177</b>	
Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	8.276.318	16.703.114	Penambahan kursi, meja dan lemari arsip untuk UPTD/kantor/balai KB
Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	63.103.027	109.320.063	Pembelian PC Dekstop, Laptop, Printer untuk mengganti yang telah rusak dan pembelian scanner untuk memudahkan pembuatan laporan kegiatan dan pengarsipan
<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK</b>	<b>95.360.624</b>	<b>215.934.411</b>	
<b>Kegiatan Pemanduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk</b>	<b>24.751.590</b>	<b>24.751.590</b>	
Sub Kegiatan Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	24.751.590	24.751.590	
<b>Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>70.609.034</b>	<b>191.182.821</b>	
Sub Kegiatan Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain	21.027.339	21.027.339	
Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	24.547.373	24.547.373	
Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	0	7.964.204	Penambahan Dana DAK Non Fisik BOKB
Sub Kegiatan Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian	25.034.322	137.643.905	

Lapangan dan Pelayanan KB			
<b>PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA</b>	<b>1.968.262.366</b>	<b>4.723.341.676</b>	
<b>Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal</b>	<b>74.682.468</b>	<b>826.268.532</b>	
Sub Kegiatan Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	0	4.374.800	Penambahan Dana DAK Non Fisik BOKB
Sub Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	0	24.980.236	Penambahan Dana DAK Non Fisik BOKB
Sub Kegiatan Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	74.682.468	145.318.968	
Sub Kegiatan Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan mini Lokakkarya (Minilok)	0	166.100.000	Penambahan Dana DAK Non Fisik BOKB
Sub Kegiatan Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	0	445.494.528	Penambahan Dana DAK Non Fisik BOKB
Sub Kegiatan Pengendalian Program KKBPK	0	40.000.000	Penambahan Dana DAK Non Fisik BOKB
<b>Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)</b>	<b>1.436.578.245</b>	<b>2.084.574.005</b>	
Sub Kegiatan Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	1.436.578.245	2.084.574.005	
<b>Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>457.001.653</b>	<b>1.434.099.139</b>	
Sub Kegiatan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	0	9.889.770	Penambahan Dana DAK Non Fisik BOKB
Sub Kegiatan Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	365.703.871	431.050.571	Penambahan Dana DAK Non Fisik BOKB
Sub Kegiatan Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	50.190.000	59.750.000	
Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	0	892.301.016	Penambahan Dana DAK Non Fisik BOKB

Sub Kegiatan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	41.107.782	41.107.782	
<b>Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB</b>	<b>0</b>	<b>378.400.000</b>	
Sub Kegiatan Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	0	378.400.000	Penambahan Dana DAK Non Fisik BOKB
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA</b>	<b>466.506.891</b>	<b>2.481.507.100</b>	
<b>Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>	<b>466.506.891</b>	<b>2.481.507.100</b>	
Sub Kegiatan Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	204.121.140	115.901.357	Terjadi pengurangan jumlah peserta Jambore Ajang Kreatifitas Genre dari 143 orang peserta menjadi 55 orang peserta
Sub Kegiatan Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	159.998.550	159.998.550	
Sub Kegiatan Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	102.387.201	102.387.201	
Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB,BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	0	1.728.220.000	Penambahan Dana DAK Non Fisik BOKB
Sub Kegiatan Pengadaan Sarana kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB,BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	0	374.999.992	Penambahan Dana DAK Non Fisik BOKB

### BAB III

## HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

### 3.1 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Capaian pelaksanaan program dan kegiatan dituangkan menggunakan table sebagai berikut :

**Tabel 3.1.1 Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak**

No	Urusan Pemerintah Bidang	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Prog/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Masalah	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak			<b>Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan</b>	Jumlah kelompok home industri yang dibina 38 Kelompok	38 Kelompok	-	-	-
				<b>Kegiatan : Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	Jumlah koordinasi organisasi perempuan 15 Organisasi	15 Organisasi	-	-	-
				Sub Kegiatan: Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan	Jumlah organisasi perempuan yang dibina	29	-	-	-

				Kabupaten/Kota	29 Organisasi	Organisasi			
				<b>Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)</b>	Pelaksanaan Kegiatan Jambore 1 kali	1 kali	-	-	-
				<b>Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	Pelaksanaan Kegiatan Shanak 1 kali	1 kali	-	-	-
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi 3 kali	2 kali	Kegiatan pertama bekerjasama dengan MTsN 2 Pelaihari dengan DP2KBP3A berpartisipasi sebagai Narasumber.  Kegiatan kedua bekerjasama dengan DPPP A Prov. Kalsel yang melaksanakan pelantikan FAD	2 kegiatan dapat terlaksana dengan cara bekerjasama dengan pihak-pihak terkait	Agar dapat menganggarkan beserta Uang Harian Kegiatan

							Kec. Panyipatan sekaligus aksi perang sampah di Pantai Batakan Baru dalam rangka Sosialisasi KLA		
					Jumlah peserta Jambore Forum Anak Daerah 60 Peserta	60 Peserta	Kegiatan ketiga tidak dilaksanakan karena tidak ada anggaran untuk uang harian di DPA.		
				<b>Program Perlindungan Perempuan</b>			-	-	-
				Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kasus Perempuan yang Ditangani 10 kasus	12 kasus	-	-	-

				Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kasus perempuan yang ditangani 100 %	100%	-	-	-
				Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pertemuan Koordinasi dan Kerja Sama Lintas Sektor dalam Pencegahan KtPA/TPPO 3 kali	3 kali	-	-	-
				Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pelayanan bagi perempuan Korban Kekerasan dan/atau TPPO	12 kasus	-	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan	10 kasus				

				Kabupaten/Kota					
				<b>Program Perlindungan Khusus Anak</b>					
				Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Pertemuan Koordinasi dan Kerja Sama Lintas Sektor dalam Pencegahan KtPA/TPPO	7 kali	-	-	-
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	3 kali				
				Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kasus anak yang ditangani 30 kasus	35 kasus	-	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelayanan bagi Anak Korban Kekerasan dan/atau TPPO	35 kasus	-	-	-
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan	30 kasus				

				Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota					
				Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelatihan Manajemen dan Penanganan Kasus Anak 1 kali	1 kali	-	-	-
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					

Tabel 3.1.2 Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Urusan Pemerintah Bidang	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Prog/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Masalah	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	DP2KBP3A		Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100%				
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan pembayaran gaji dan TPP ASN 12 bulan	Jumlah bulan pembayaran gaji dan TPP ASN 12 bulan			
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100%				
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah terbelinya baterai / 2 jenis 24 bungkus	Jumlah terbelinya baterai / 2 jenis 24 bungkus			
					Jumlah terbelinya lampu penerang / 3 jenis 43 buah	Jumlah terbelinya lampu penerang / 3 jenis 43 buah			

					Jumlah terbelinya alat listrik 4 jenis	Jumlah terbelinya alat listrik 4 jenis			
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor Yang di beli 30 jenis	Jumlah Alat Tulis Kantor Yang di beli 30 jenis			
					Jumlah alat/bahan komputer yang dibeli 2 jenis	Jumlah alat/bahan komputer yang dibeli 2 jenis			
					Jumlah materai yang dibeli 400 lembar	Jumlah materai yang dibeli 400 lembar			
2	DP2KBP3A			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penjilidan 20 buku	Jumlah Penjilidan 16 buku	4 DPA DAK tidak sempat terjilid karena masih banyak Tim TAPD belum tanda tangan		
					Jumlah penyediaan barang cetakan 210 cetak	Jumlah penyediaan barang cetakan 210 cetak	-		
					Jumlah penyediaan penggandaan 40053 lembar fotocopy	Jumlah penyediaan penggandaan 17275 lembar fotocopy	22778 tidak terealisasi karena memanfaatkan fasilitas printer yang ada di kantor untuk memfotocopy		

			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah surat kabar harian yang terbeli 730 eksemplar	Jumlah surat kabar harian yang terbeli 730 eksemplar			
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah keikutsertaan pameran 2 event	Jumlah keikutsertaan pameran 2 event			
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah makanan dan minuman jamuan tamu 30 orang	Jumlah makanan dan minuman jamuan tamu 30 orang			
				Jumlah perjalanan dinas yang diikuti 12 bulan	Jumlah perjalanan dinas yang diikuti 12 bulan			
				Jumlah rapat yang dilaksanakan 16 kali	Jumlah rapat yang dilaksanakan 16 kali			
				Jumlah kegiatan pelatihan PPRG 1 kali	Jumlah kegiatan pelatihan PPRG 1 kali			
			<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100%</b>				
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran tagihan air dan listrik 12 bulan	Jumlah pembayaran tagihan air dan listrik 12 bulan			

3	Sekretariat	DP2KBP3A	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah honorarium Pegawai Tidak Tetap yang terbayar selama 12 bulan 18 orang	Jumlah honorarium Pegawai Tidak Tetap yang terbayar selama 12 bulan 18 orang			
				Jumlah pengiriman surat 1 Tahun / 12 bulan	Jumlah pengiriman surat 1 Tahun / 12 bulan			
				Jumlah peralatan dan bahan kebersihan yang terbeli 26 jenis	Jumlah peralatan dan bahan kebersihan yang terbeli 26 jenis			
			<b>Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100%</b>				
			Pengadaan Mebel	Jumlah kursi kerja yang terbeli 4 buah	Jumlah kursi kerja yang terbeli 4 buah			
				Jumlah lemari arsip yang terbeli 2 buah	Jumlah lemari arsip yang terbeli 2 buah			
				Jumlah meja kerja yang terbeli 4 buah	Jumlah meja kerja yang terbeli 4 buah			
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung	Jumlah AC yang terbeli 2 buah	Jumlah AC yang terbeli 2 buah			

				Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah PC Desktop yang terbeli 5 buah	Jumlah PC Desktop yang terbeli 5 buah			
					Jumlah Laptop yang terbeli 1 buah	Jumlah Laptop yang terbeli 1 buah			
					Jumlah Scanner yang terbeli 1 buah	Jumlah Scanner yang terbeli 1 buah			
					Jumlah printer yang terbeli 5 buah	Jumlah printer yang terbeli 5 buah			
4		DP2KBP3A		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100%</b>				
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/mobil jabatan yang terpelihara selama 1 tahun 1 unit	Jumlah kendaraan dinas/mobil jabatan yang terpelihara selama 1 tahun 1 unit			

				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan roda 2 yang terpelihara 6 unit	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan roda 2 yang terpelihara 5 unit	1 unit kendaraan tidak memerlukan pemeliharaan karena kondisi kendaraan tersebut masih dalam keadaan baik dan jarang dipakai.	Akan diserahkan kepada yang memerlukan untuk dipakai	
					Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan roda 4 yang terpelihara 4 unit	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan roda 4 yang terpelihara 4 unit			
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara 1 unit	Jumlah gedung kantor yang terpelihara 1 unit			
					Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara 18 unit	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara 18 unit			
5		DP2KBP3A		<b>Pembinaan Keluarga Berencana (KB)</b>					

				<b>Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasespsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Pengendalian Alat, Obat Kontrasepsi (ALOKON) dan Pelayanan KB 100%</b>				
				Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Pengadaan Minilaparotomi / Tubectomy Set 5 set	Jumlah Pengadaan Minilaparotomi / Tubectomy Set 5 set			
					Jumlah Rehabilitasi Balai Penyuluhan KB 7 unit	Jumlah Rehabilitasi Balai Penyuluhan KB 7 unit			
1		DP2KBP3A		<b>Pengendalian Penduduk</b>					
				<b>Pemanduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk</b>	<b>Persentase sektor yang tersosialisasi konsep pembangunan yang berwawasan berkependudukan dan alat ukurnya (IPBK/Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan) 18,51%</b>				

				Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Jumlah Sekolah yang dibentuk Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) 2 sekolah	Jumlah Sekolah yang dibentuk Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) 2 sekolah	-		
				<b>Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase sektor yang tersosialisasi konsep pembangunan yang berwawasan berkependudukan dan alat ukurnya (IPBK/Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan) 18,51%</b>				
2		DP2KBP3A		Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain	Jumlah Rumah Data Kependudukan Yang Di update 2 buah	Jumlah Rumah Data Kependudukan Yang Di update 2 buah	-		
				Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi keluarga 11 Balai Penyuluh KB	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi keluarga 11 Balai Penyuluh KB	-		

				Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Formulir R1/stunting yang dicetak 1593 lembar	Jumlah Formulir R1/stunting yang dicetak 1593 lembar	-		
				Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Tersedianya dukungan manajemen untuk pengelolaan program dan anggaran oleh OPD KB (BOKB) 10 bulan	Tersedianya dukungan manajemen untuk pengelolaan program dan anggaran oleh OPD KB (BOKB) 10 bulan	-		
					Tersedianya paket data komunikasi pada Balai Penyuluhan KB (BOKB) 11 Balai	Tersedianya paket data komunikasi pada Balai Penyuluhan KB (BOKB) 11 Balai	-		
					Jumlah Pengolahan dan Pelaporan Data 350 lembar data	Jumlah Pengolahan dan Pelaporan Data 350 lembar data	-		
				<b>Pembinaan Keluarga Berencana (KB)</b>					
3		DP2KBP3A		<b>Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal</b>	<b>Persentase Pemenuhan Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal 100%</b>				

				Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Pelaksanaan Dukungan Advokasi Program Bangga Kencana 1 kali	Jumlah Pelaksanaan Dukungan Advokasi Program Bangga Kencana 1 kali	-		
				Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah dukungan bahan media KIE (Momentum dan Kearifan Lokal) (BOKB) 4 paket	Jumlah dukungan bahan media KIE (Momentum dan Kearifan Lokal) (BOKB) 4 paket	-		
				Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Media Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang 4 media	Jumlah Media Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang 4 media	-		
					Jumlah sarana KIE (Pamflet) yang didistribusikan 297 buah	Jumlah sarana KIE (Pamflet) yang didistribusikan 297 buah	-		
					Jumlah sarana KIE (Poster) yang didistribusikan 101 buah	Jumlah sarana KIE (Poster) yang didistribusikan 101 buah	-		

					Jumlah Media KIE Program KKBP Melalui Media Elektronik dan Tradisional (BOKB) 18 Media	Jumlah Media KIE Program KKBP Melalui Media Elektronik dan Tradisional (BOKB) 11 Media	Kegiatan yang tidak terlaksana 100% adalah pertunjukan tradisional karena pelaksanaan terkait dengan adanya event tertentu	Melakukan Koordinasi dengan BKKBN Provinsi	
					Jumlah Media KIE yang didistribusikan (Factsheet, Leaflet, Poster) BOKB 2610 lembar	Jumlah Media KIE yang didistribusikan (Factsheet, Leaflet, Poster) BOKB 2610 lembar	-		
					Jumlah honor Tim Website 10 bulan	Jumlah honor Tim Website 10 bulan	-		
				Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBP melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Pelaksanaan Mini Lokakarya Tingkat Kecamatan se Kabupaten Tanah Laut 110 Kali	Jumlah Pelaksanaan Mini Lokakarya Tingkat Kecamatan se Kabupaten Tanah Laut 103 Kali	1. Pelaksanaan kegiatan adalah Balai Penyuluh KB kecamatan 2. Kegiatan yang tidak terlaksana adalah kecamatan Tambang Ulang 2 Kegiatan Minilok, Kecamatan Kintap 5 Kegiatan Minilok	Melakukan Monitoring dan Pembinaan ke Balai Penyuluhan KB Kecamatan	

				Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPk	Jumlah Pelaksanaan Operasional Penyuluhan KB di 11 Kecamatan 110 kali	Jumlah Pelaksanaan Operasional Penyuluhan KB di 11 Kecamatan 110 kali	-		
				Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPk	Jumlah Pelaksanaan Operasional Orientasi Tenaga Lini Lapangan di 11 Kecamatan 44 Kali	Jumlah Pelaksanaan Operasional Orientasi Tenaga Lini Lapangan di 11 Kecamatan 43 Kali	Pelaksana Kegiatan adalah Balai Penyuluhan KB Kecamatan Kegiatan yang tidak terlaksana adalah Kecamatan Bati-Bati	Melakukan Monitoring dan Pembinaan ke Balai Penyuluhan KB Kecamatan	
			Jumlah Pelaksanaan Operasional Pembinaan Kader IMP di 11 Kecamatan 44 Kali		Jumlah Pelaksanaan Operasional Pembinaan Kader IMP di 11 Kecamatan 43 Kali	Pelaksana Kegiatan adalahh Balai Penyuluhan KB Kecamatan, Kegiatanyang tidak tterlaksana adalah Kecamatan Kintap	Melakukan Monitoring dan Pembinaan ke Balai Penyuluhan KB Kecamatan		
			Jumlah Pelaksanaan Operasional Pengolahan Data di 11 Kecamatan 110 kali		Jumlah Pelaksanaan Operasional Pengolahan Data di 11 Kecamatan 110 kali	-			

				Pengendalian Program KKBP	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pertemuan Audit Kasus Stunting 2 kali	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pertemuan Audit Kasus Stunting 2 kali	-		
				<b>Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)</b>	<b>Persentase Pendayagunaan Petugas KB di Lini Lapangan 100%</b>				
				Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader PPKBD yang Dibayar Honorarium Selama 9 bulan 135 kader x 9 bulan = 1215	Jumlah Kader PPKBD yang Dibayar Honorarium Selama 9 bulan 135 kader x 9 bulan = 1215	-		
					Jumlah Kader Sub PPKBD yang Dibayar Honorarium Selama 7 bulan 421 kader x 7 bulan = 2947	Jumlah Kader Sub PPKBD yang Dibayar Honorarium Selama 7 bulan 421 kader x 7 bulan = 2947	-		
				Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) Oleh Kader Di Wilayah Kerjanya (BOKB) 5560 kali	Jumlah Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) Oleh Kader Di Wilayah Kerjanya (BOKB) 5560 kali	-		
					Jumlah Pelaksanaan Lomba Kader IMP 1 lomba	Jumlah Pelaksanaan Lomba Kader IMP 1 lomba	-		

				<b>Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber- KB</b>	<b>Persentase Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB 100%</b>	<b>Persentase Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB 100%</b>			
				Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah pelaksanaan Operasional Ketahanan Keluarga 22 kampung KB	Jumlah pelaksanaan Operasional Ketahanan Keluarga 22 kampung KB	-		
					Jumlah pelaksanaan Operasional Pokja Kampung KB 22 kampung KB	Jumlah pelaksanaan Operasional Pokja Kampung KB 22 kampung KB	-		
				Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Akseptor KB Implant/IUD yang dilayani sebanyak 700 akseptor	Jumlah Akseptor KB Implant/IUD yang dilayani sebanyak 340 akseptor	Ada 2 sumber pendanaan yang dapat di Klaim, yaitu dana dari DP2KBP3A dan dana dari BPJS.	Sosialisasi dari PKB lebih aktif dan mengarahkan pengklaiman menggunakan dana dari DP2KBP3A	
					Jumlah Akseptor KB MOP yang dilayani sebanyak 3 akseptor	Tidak ada	Belum ada peminat yang ingin melaksanakan MOP	Mensosialisasikan tentang Metode Kontrasepsi Jangka	

								Panjang	
					Jumlah Akseptor KB MOW yang dilayani sebanyak 50 akseptor	Jumlah Akseptor KB MOW yang dilayani sebanyak 6 akseptor	Kurangnya peminat dari akseptor KB karena MOW bersifat permanen	Mensosialisasikan tentang Metode Kontrasepsi Jangka Panjang	
					Jumlah Akseptor Penggerakan Pelayanan Medis Operasi Wanita (DAK Non Fisik BOKB) sebanyak 21 orang	Jumlah Akseptor Penggerakan Pelayanan Medis Operasi Wanita (DAK Non Fisik BOKB) sebanyak 12 orang	Kurangnya peminat dari akseptor KB karena MOW bersifat permanen	Mensosialisasikan tentang Metode Kontrasepsi Jangka Panjang	
					Jumlah Akseptor Penggerakan Pelayanan Pemasangan KB Implant (DAK Non Fisik BOKB) sebanyak 256 orang	Jumlah Akseptor Penggerakan Pelayanan Pemasangan KB Implant (DAK Non Fisik BOKB) sebanyak 256 orang	-	-	-
				Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Akseptor Penggerakan Pelayanan Pemasangan KB IUD (DAK Non Fisik BOKB) sebanyak 52 orang	Jumlah Akseptor Penggerakan Pelayanan Pemasangan KB IUD (DAK Non Fisik BOKB) sebanyak 36 orang	masih kurangnya peminat masyarakat untuk melakukan IUD	Mensosialisasikan tentang Metode Kontrasepsi Jangka Panjang	

					Jumlah Akseptor Penggerakan Pelayanan Pencabutan KB Implant (DAK Non Fisik BOKB) sebanyak 26 orang	Jumlah Akseptor Penggerakan Pelayanan Pencabutan KB Implant (DAK Non Fisik BOKB) sebanyak 26 orang			
					Jumlah Pelaksanaan Evaluasi Pelayanan KB sebanyak 1 pertemuan	Jumlah Pelaksanaan Evaluasi Pelayanan KB sebanyak 1 pertemuan	-	-	
					Jumlah Pelaksanaan Pelayanan KB Bergerak / Pembinaan / Monitoring / Evaluasi Program Keluarga Berencana di 11 Kecamatan sebanyak 4 kali	Jumlah Pelaksanaan Pelayanan KB Bergerak / Pembinaan / Monitoring / Evaluasi Program Keluarga Berencana di 11 Kecamatan sebanyak 4 kali			
					Jumlah Pelaksanaan Pelayanan Komplikasi selama 1 tahun	Jumlah Pelaksanaan Pelayanan Komplikasi selama 1 tahun			
				Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Pelayanan KB di Faskes (DAK Non Fisik BOKB) sebanyak 2 kegiatan	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Pelayanan KB di Faskes (DAK Non Fisik BOKB) sebanyak 2 kegiatan			

				dan Jejaringnya	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Pelayanan KB di Faskes (DAK Non Fisik BOKB) sebanyak 40 kali	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Pelayanan KB di Faskes (DAK Non Fisik BOKB) sebanyak 40 kali			
					Jumlah Pelaksanaan Pembinaan, Evaluasi dan Monitoring Tim Keluarga Berencana Keliling (TKBK) sebanyak 21 faskes	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan, Evaluasi dan Monitoring Tim Keluarga Berencana Keliling (TKBK) sebanyak 21 faskes			
				Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta hak-hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Jumlah Pelaksanaan Orientasi Kesehatan Reproduksi sebanyak 2 pertemuan	Jumlah Pelaksanaan Orientasi Kesehatan Reproduksi sebanyak 2 pertemuan			
				Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Pengadaan Minilaparotomi / Tubectomy Set sebanyak 5 set	Jumlah Pengadaan Minilaparotomi / Tubectomy Set sebanyak 5 set			
		DP2KBP3A		<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</b>					
				<b>Pelaksanaan Pembangunan</b>					

				<b>Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>					
				Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Pengadaan BKB Kit Stunting sebanyak 20 paket	Jumlah Pengadaan BKB Kit Stunting sebanyak 20 paket			
				Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Pengadaan Kit Siap Nikah sebanyak 1 paket	Jumlah Pengadaan Kit Siap Nikah sebanyak 1 paket			
				Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Pelaksanaan Lomba Pada Jambore Ajang Kreatifitas Genre sebanyak 1 kegiatan	Jumlah Pelaksanaan Lomba Pada Jambore Ajang Kreatifitas Genre sebanyak 1 kegiatan			
				(BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Pelaksanaan Lomba Pada Jambore Ajang Kreatifitas Genre sebanyak 3 lomba	Jumlah Pelaksanaan Lomba Pada Jambore Ajang Kreatifitas Genre sebanyak 3 lomba			

					Jumlah Pelaksanaan Pembekalan tentang Program PIK-R/Genre pada Jambore Ajang Kreatifitas Genre sebanyak 2	Jumlah Pelaksanaan Pembekalan tentang Program PIK-R/Genre pada Jambore Ajang Kreatifitas Genre sebanyak 2			
					Jumlah Pelaksanaan Pembinaan, Evaluasi dan Monitoring Program PIK-Remaja di 11 Kecamatan sebanyak 2 kali	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan, Evaluasi dan Monitoring Program PIK-Remaja di 11 Kecamatan sebanyak 2 kali			
				Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Pelaksanaan Hari Keluarga Nasional Tingkat Kabupaten Tanah Laut sebanyak 1 kali	Jumlah Pelaksanaan Hari Keluarga Nasional Tingkat Kabupaten Tanah Laut sebanyak 1 kali			
			Jumlah Pelaksanaan Orientasi Tri Bina Ketahanan Keluarga (BKB/BKL/BKR) sebanyak 1 kali		Jumlah Pelaksanaan Orientasi Tri Bina Ketahanan Keluarga (BKB/BKL/BKR) sebanyak 1 kali				
			Jumlah Pelaksanaan Orientasi Tri Bina Ketahanan Keluarga (BKB/BKL/BKR) sebanyak 3 kali keliling		Jumlah Pelaksanaan Orientasi Tri Bina Ketahanan Keluarga (BKB/BKL/BKR) sebanyak 3 kali keliling				

					Jumlah Pelaksanaan Pembinaan dan Lomba sebanyak 2 lomba	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan dan Lomba sebanyak 2 lomba			
					Jumlah Pelaksanaan Pembinaan, Evaluasi dan Monitoring Program Ketahanan Keluarga sebanyak 4 kali	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan, Evaluasi dan Monitoring Program Ketahanan Keluarga sebanyak 4 kali			
				Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Pelaksanaan Pendampingan Calon Pengantin di Desa (DAK Non Fisik BOKB) sebanyak 5092 kali	Jumlah Pelaksanaan Pendampingan Calon Pengantin di Desa (DAK Non Fisik BOKB) sebanyak 314 kali	kurangnya kesadaran dari masyarakat/Catn tentang program pemerintah mengenai aplikasi Elsimil dan pendampingan, sehingga masih banyak calon pengantin yang tidak bisa terdeteksi	berkoordinasi dengan PKB, KUA, Tim Pendamping Keluarga mengenai aplikasi Elsimil	

					Jumlah Pelaksanaan Pendampingan Ibu Hamil di Desa (DAK Non Fisik BOKB) sebanyak 57288 kali	Jumlah Pelaksanaan Pendampingan Ibu Hamil di Desa (DAK Non Fisik BOKB) sebanyak 8155 kali	Keterlambatan Kejelasan dalam pembuatan laporan dan pencairan dana	Tim Kabupaten berperan aktif dalam mensosialisasi program pendampingan keluarga (pembuatan laporan dan pencairan dana) ke Tim Pendamping Keluarga di setiap desa	
					Jumlah Pelaksanaan Pendampingan Pasca Salin di Desa (DAK Non Fisik BOKB) sebanyak 14322 kali	Jumlah Pelaksanaan Pendampingan Pasca Salin di Desa (DAK Non Fisik BOKB) sebanyak 2281 kali	Keterlambatan Kejelasan dalam pembuatan laporan dan pencairan dana	Tim Kabupaten berperan aktif dalam mensosialisasi program pendampingan keluarga (pembuatan laporan dan pencairan dana) ke Tim Pendamping Keluarga di setiap desa	

					Jumlah Penyediaan Pulsa/Paket Data Surveillance Penurunan Stunting untuk Tim Pendamping Keluarga (DAK Non Fisik BOKB) sebanyak 801 orang	Jumlah Penyediaan Pulsa/Paket Data Surveillance Penurunan Stunting untuk Tim Pendamping Keluarga (DAK Non Fisik BOKB) sebanyak 801 orang			
				Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Gelar Dagang Produk UPPKA yang Diikuti sebanyak 2 event	Jumlah Gelar Dagang Produk UPPKA yang Diikuti sebanyak 1 event	Tidak ada nya pelaksanaan gelar dagang produk dari BKKBN Tingkat Provinsi		
					Jumlah Pelaksanaan Orientasi UPPKA sebanyak 2 pertemuan	Jumlah Pelaksanaan Orientasi UPPKA sebanyak 2 pertemuan			
					Jumlah Pelaksanaan Pembinaan & Lomba UPPKA sebanyak 1 lomba	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan & Lomba UPPKA sebanyak 1 lomba			
					Jumlah Pembinaan / Monitoring / Evaluasi Program Serta Kegiatan Pemberdayaan Keluarga di 11 Kecamatan sebanyak 4 kali	Jumlah Pembinaan / Monitoring / Evaluasi Program Serta Kegiatan Pemberdayaan Keluarga di 11 Kecamatan sebanyak 4 kali			

### 3.2. Capaian Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Capaian kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah. Laporan capaian kinerja urusan pemerintahan daerah memuat data/informasi kinerja setiap urusan pemerintahan sesuai dengan indikator masing-masing urusan pemerintahan dan urusan penunjang. Data/informasi setiap indikator wajib diisi oleh pemerintah daerah secara lengkap.

**Tabel 3.2.1. Indikator Kinerja Kunci Keluaran**

No	Urusan Pemerintahan	No	Indikator Kinerja Kunci Hasil	No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak	1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	1	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilatih PUG	43 SKPD	DP2KBP3A	
				2	Jumlah program/kegiatan PUG pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten/kota	10 Program, 18 Kegiatan	DP2KBP3A	
		2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota	1	Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemkab/kota (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak	<b>2 (Dua)</b> - Barito Post - Radio Tuntung Pandang	DP2KBP3A	
				2	Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	<b>30 (Tiga Puluh)</b> 1) 8 (Delapan) SKPD - RS Boejasin - Polres - Kejaksaan - Pengadilan		

					-Dinas Sosial -Dukcapil -Dinas Pendidikan, -UPTD PPA 2) 22 PATBM Desa			
				3	Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	$36/36 \times 100\% = 100\%$	DP2KBP3A	
				4	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan	11 (Sebelas) PATBM di 11 Desa	DP2KBP3A	
				5	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/ fasilitas oleh pemkab/kota (APBD kab/kota)	<b>5 (Lima)</b> -UPTD PPA -Dinsos -Dukcapil -Dinas Pendidikan, -Disnakertrans	DP2KBP3A	
		3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 Penduduk perempuan)	1	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dalam bidang perempuan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan	2 (dua) - GOW - DWP	DP2KBP3A	
				2	Jumlah kader perempuan tingkat kabupaten/kota yang sudah dilatih	80 kader	DP2KBP3A	
				3	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan	2 (dua) -GOW -DWP	DP2KBP3A	
				4	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten/kota	<b>5 (Lima)</b> -UPTD PPA -Dinsos -Dukcapil -Dinas Pendidikan,	DP2KBP3A	

						-Disnakertrans		
				5	Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi	1 (satu)	DP2KBP3A	
				6	Jumlah lembaga penyediaan layanan perlindungan hak perempuan yg telah terstandardisasi	2 (dua) UPTD, Rumah Perlindungan	DP2KBP3A	
				7	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	13/13x100% =100%	DP2KBP3A	
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1	TFR (Angka Kelahiran Total)	1	Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan	1	DP2KBP3A	
				2	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	20,44	DP2KBP3A	
				3	Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	24,96	DP2KBP3A	
				4	Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)	72,1 % (Petugas) 69,6 % (Media) Sumber data PK 2021	DP2KBP3A	
				5	Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK	649	DP2KBP3A	
		2	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	1	Persentase Fasilitasi Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	(63 Faskes yang terdaftar dari New SIGA) 63/63 x 100% = 100%	DP2KBP3A	

				2	Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	$4674/45144 \times 100\% = 10,35$ (dari New SIGA)	DP2KBP3A
				3	Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif	21	DP2KBP3A
				4	Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan	44,88	DP2KBP3A
		3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	1	Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah	0,14	DP2KBP3A
				2	Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	75,59	DP2KBP3A

Pelaihari, Januari 2023

Mengetahui,  
Kepala Dinas P2KBP3A  
Kabupaten Tanah Laut



**H. NOR HIDAYAT**  
Pembina Utama Muda / Ivc  
NIP. 19630824 199403 1 007

**Tabel 3.2.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil**

No	Urusan Pemerintahan	No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
Urusan Wajib						
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	$\frac{\text{Jumlah ARG pada belanja langsung APBD} = \text{Rp } 8.947.145.810}{\text{Jumlah seluruh belanja langsung APBD} = \text{Rp } 268.335.448.124} \times 100\%$	3,33	DP2KBP3A BPKAD
		2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	$\frac{\text{Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat kabupaten yang didampingi} = 36}{\text{Jumlah Anak (Penduduk usia Kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang menjadi kewenangan Kab/Kota} = 105,893} \times 100\%$	100	DP2KBP3A Disudicapil
		3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	$\frac{\text{Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan} = 13}{\text{Jumlah penduduk perempuan} = 176.020} \times 100.000$	0,01	DP2KBP3A
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1	TFR (Angka Kelahiran Total)	TFR= $\sum$ ASFR	2,12	DP2KBP3A
		2	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	$\frac{\text{Jumlah peserta KB Aktif Modern} = 44.861}{\text{Jumlah Pasangan Usia Subur} 59.161} \times 100\%$	75,83%	DP2KBP3A

		3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani = 6.930 ----- x 100% Jumlah Pasangan Usia Subur = 59.161	11,71	DP2KBP3A	
--	--	---	---------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	----------	--

Pelaihari, Januari 2023

Mengetahui,  
Kepala Dinas P2KBP3A  
Kabupaten Tanah Laut



**Ir. NOR HIDAYAT**  
Pembina Utama Muda / IVc  
NIP. 19630824 199403 1 007

## **BAB IV PENUTUP**

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang disusun oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut adalah laporan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah selama 1 (satu) tahun anggaran yang dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang disampaikan Kepala Daerah.

Dari hasil kinerja yang dilaporkan pada Tahun Anggaran 2022, dapat disimpulkan bahwa dalam pembangunan yang telah dilaksanakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan serta pengendalian dan pengawasan terhadap seluruh kegiatan, pada umumnya berjalan dengan baik dan lancar.

Pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Tanah Laut akan terus dilanjutkan, tidak dapat dipungkiri bahwa masih terdapat kondisi yang belum sesuai dengan seluruh harapan, tuntutan dan kebutuhan masyarakat secara optimal. Oleh karena itu evaluasi dilakukan terus menerus untuk dapat dijadikan acuan bagi perbaikan penyelenggaraan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Demikian Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) dan LPPD Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut ini disampaikan untuk dapat dijadikan bahan evaluasi dan bahan informasi pembangunan bagi seluruh warga Kabupaten Tanah Laut.

Pelaihari,      Januari 2023

Kepala Dinas P2KBP3A  
Kabupaten Tanah Laut,

  
**Ir. NOR HIDAYAT**  
**Pembina Utama Muda (IV/c)**  
**NIP. 19630824 199403 1 007**